



## KEJADIAN KHUSUS, BISA DISIAPKAN APBD Kota Yogya 2023 Tak Alokasikan BLT

**YOGYA (KR)** - Dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogya 2023 sudah tidak dialokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kendati demikian, jika ada kejadian khusus atas arahan pemerintah pusat, maka Pemkot tetap bisa menyiapkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, menjelaskan sejak dalam proses pembahasan hingga ditetapkan, tidak ada informasi mengenai alokasi khusus BLT kepada masyarakat. "Sejauh ini tidak ada informasi mengenai alokasi khusus untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang dinilai terdampak BBM atau pandemi di APBD 2023," jelasnya, Jumat (20/1).

Meski begitu, dirinya memastikan apabila di kemudian hari ada kebijakan khusus yang harus dijalankan pemerintah daerah berdasarkan arahan dari pemerintah pusat maka Pemkot Yogya

siap memenuhinya. "Jika nanti di dalam perjalanan anggaran ada arahan dari pusat, termasuk alokasi bantuan langsung tunai, maka kami siap mengikuti dan patuh," tandasnya.

Oleh karena itu masyarakat yang memerlukan kebijakan afirmatif tidak perlu khawatir. Konstruksi APBD Kota Yogya 2023 tetap mendasarkan pada kepentingan masyarakat. Sehingga jika ada arahan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan BLT, maka Pemkot bisa menggunakan dana dari pos anggaran biaya tidak terduga. "Tetapi, sampai sekarang tidak ada arahan seperti itu. Apakah memang karena situasi perekonomian mulai stabil atau kondisi pandemi mulai stabil. Mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan," imbuhnya.

Pada tahun anggaran 2022 Pemkot mengalokasikan anggaran untuk pemberian BLT bagi warga miskin yang terdampak kenaikan harga BBM dan belum mendapat ban-

tuan sosial apapun dari pemerintah pusat. Alokasi tetap disamakan dengan pusat yakni Rp 600.000 per penerima. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi 3.420 keluarga miskin yang belum menerima program serupa dari mana pun. Selain itu Pemkot juga memberikan bantuan dengan nilai total Rp 600.000 per penerima kepada sekitar 500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak kenaikan harga BBM.

Sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam APBD Kota Yogya sudah melekat pada program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). "Tidak ada alokasi khusus. Anggaran mengalir secara sektoral. Misalnya kegiatan di bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan, atau kebutuhan koordinasi penanganan dilakukan oleh BPBD Kota Yogya. Semua melekat di OPD terkait," pungkasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005